

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemangku kepentingan dalam perusahaan terdiri dari berbagai pihak, diantaranya pemilik ekuitas dan manajer. Pemilik sebagai pihak yang menyediakan dana untuk perusahaan, dan manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola dana pemilik untuk operasional perusahaan. Pemilik tidak terlibat dalam pengambilan keputusan harian perusahaan, melainkan manajer yang bertindak sebagai agen bagi pemilik dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Manajer memiliki akses informasi yang lebih kompleks mengenai perusahaan, sehingga dibutuhkan media untuk memfasilitasi akses informasi mengenai perusahaan bagi pemangku kepentingan yang lain yaitu laporan keuangan.

Dalam PSAK No.1 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen yang menyajikan kekayaan entitas secara terstruktur dan kinerja entitas yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang kondisi keuangan, kinerja operasional perusahaan di tahun berjalan, dan bagaimana jalannya arus kas yang dimiliki perusahaan. Komponen laporan keuangan meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi komparatif.

Berbagai macam pihak pemakai laporan keuangan mempunyai kepentingan yang berbeda. Misalkan kreditor yang memberi pinjaman pada perusahaan mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pinjaman pokoknya selama jangka waktu pinjaman. Investor (pemegang saham) berkepentingan untuk memperoleh laba, pertumbuhan laba per lembar saham dan kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara terus menerus. Oleh karena itu, penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan menjadi tidak sederhana, karena mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (Soetedjo, 2009:11).

Dalam perkembangan bisnis, pemilik menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pada kondisi ini pemilik tidak dapat mengelola sendiri, sehingga tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan pada pihak kedua. Keputusan ini menyebabkan terjadinya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam melaksanakan tugas manajerial, ada kalanya manajer memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan prinsipal didalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Manajer membebankan biaya kepada perusahaan sehingga mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan disebut sebagai konflik keagenan (*agency conflict*).

Pemilik perlu memastikan bahwa manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Oleh karena itu pemilik menunjuk pihak profesional independen, dalam hal ini akuntan publik untuk menilai dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen tidak mengandung bias dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Imbalan atas jasa pemeriksaan oleh akuntan independen termasuk biaya yang timbul akibat adanya *agency conflicts*, yang disebut sebagai *agency cost*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada tiga kategori *agency cost* yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai kepentingan principal. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Auditor berperan penting dalam melindungi hak investor dengan mendeteksi salah saji maupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Proses audit laporan keuangan bertujuan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, bukan untuk menciptakan

informasi baru (Boynton *et al.* 2002:50). Tanggung jawab auditor yaitu memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan, bukan penjaminan mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan benar.

Auditor dalam menjalankan audit dapat menentukan besarnya *fee* yang dikenakan pada klien atas jasa yang diberikan. Boynton *et al.* (2002:8) menyatakan bahwa auditor independen bekerja berdasarkan imbalan (*fee*), sebagaimana halnya dengan profesi medis dan hukum. *Audit fee* harus mencakup biaya masukan yang dikeluarkan auditor dan laba yang diharapkan (Xu dan Tagesson, 2011). Auditor harus bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan audit laporan keuangan karena audit yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Persaingan dalam *audit market* menimbulkan kemungkinan bahwa auditor menetapkan *fee* secara tidak wajar atau tidak adil, sehingga dapat mengancam independensi dan obyektivitas. *Audit fee* sendiri ditentukan melalui proses negosiasi antara pihak stakeholders dengan kantor akuntan publik yang menaungi auditor tersebut dengan memperhatikan berbagai faktor. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*.

Kewajiban pengungkapan *audit fee* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012. Ketentuan tersebut tercantum pada angka 2 huruf e poin 16 bahwa perusahaan harus mencantumkan nama dan alamat lembaga profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal

yang memberikan jasa secara berkala kepada emiten atau perusahaan publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, *fee*, dan periode penugasan yang telah dilakukan. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012, namun pada laporan tahunan perusahaan publik tahun 2012 tidak semua perusahaan mencantumkan jumlah *audit fee* yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai penentuan *audit fee* merupakan topik yang menarik dan telah banyak dilakukan di dunia internasional. Sebagian besar mengembangkan model penentuan *audit fee* yang diperkenalkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Simunic (1980). Berbagai macam variabel digunakan sesuai dengan ketersediaan data pada masing-masing obyek penelitian untuk mengetahui variabel mana yang paling konsisten memiliki hubungan signifikan dengan *audit fee*. Pengetahuan mengenai imbalan jasa bagi eksternal auditor dapat bermanfaat bagi klien audit dan auditor. Bagi klien mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *audit fee* dapat memberikan referensi dalam negosiasi mengenai jumlah *audit fee*. Sedangkan bagi auditor dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan *audit fee* yang sesuai atas jasa audit yang dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit fee* antara lain ukuran KAP, tipe industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan *audit tenure* (Naser dan Nuseibeh, 2007; Xu dan Tagesson, 2011; Hay (2012); Hassan dan Naser, 2013; Kikhia, 2014; Joshi *et al.* 2014).

Kantor akuntan publik *big four* merupakan kantor akuntan yang tersebar di berbagai belahan dunia berafiliasi dengan KAP lokal di setiap negara. Ukuran

KAP dapat ditentukan dengan melihat status KAP apakah berafiliasi dengan KAP *big four* atau merupakan KAP lokal (Hassan dan Naser, 2013). Perusahaan akan membayar *audit fee* yang lebih tinggi kepada KAP yang berafiliasi dengan *big four* berkaitan dengan *brand name* internasional yang melekat pada KAP tersebut (Xu dan Tagesson, 2011; Besacier dan Schatt, 2007).

Tingkat kualitas audit yang dituntut oleh perusahaan manufaktur lebih tinggi daripada tingkat di industri lain karena menghadapi kemungkinan terjadinya *agency costs* yang lebih besar. Karena perusahaan manufaktur memerlukan investasi modal besar yang memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan eksternal, mereka patut untuk melaporkan informasi lebih rinci dari perusahaan non manufaktur di laporan tahunan mereka untuk menjamin penyedia dana (Naser dan Nuseibeh, 2007). Oleh karena itu, perusahaan manufaktur memerlukan prosedur audit yang lebih rumit sehingga menyebabkan *audit fee* yang lebih tinggi dari perusahaan sektor lainnya.

Perusahaan berukuran besar terlibat aktivitas dan transaksi yang lebih banyak, dan umumnya lebih terbuka pada publik dalam mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan kecil. Sebagai konsekuensi, jasa dan waktu audit yang dibutuhkan oleh perusahaan besar lebih banyak daripada perusahaan kecil (Hassan dan Naser, 2013). Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* secara konsisten menyajikan bukti bahwa ukuran perusahaan berhubungan signifikan dengan *audit fee*. Hubungan positif antara *audit fee* dengan ukuran perusahaan klien didasarkan pada gagasan bahwa kantor akuntan publik akan melakukan peningkatan kinerja seiring dengan peningkatan

ukuran perusahaan. Peningkatan dalam kinerja auditor ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah *audit fee* (Al-Harshani, 2008).

Kompleksitas perusahaan merupakan akibat dari pembentukan departemen dan pembagian pekerjaan yang memiliki fokus terhadap jumlah unit yang berbeda. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit operasinya (anak perusahaan) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya (Kikhia, 2014). Indikator kompleksitas perusahaan yang lainnya adalah pengukuran neraca seperti piutang dan persediaan pada total aset (Chan *et al.* 1993; Peel dan Clatworthy, 2001) dalam (Naser dan Nuseibeh, 2007). Perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi membutuhkan proses audit yang lebih rumit. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah *audit fee* yang dibayarkan juga akan lebih besar.

Audit tenure merupakan jangka waktu pemberian jasa audit laporan keuangan yang diberikan oleh auditor kepada klien atau masa perikatan antara auditor dengan klien. Meta-analysis yang dilakukan oleh Hay (2012) menunjukkan bukti bahwa auditor dengan *tenure* yang pendek mengenakan *audit fee* yang lebih rendah dan auditor dengan *tenure* yang panjang mengenakan *audit fee* yang lebih tinggi pada klien.

Kikhia (2014) melakukan penelitian dengan judul “*Determinants of Audit Fees: Evidence from Jordan*”. Sampel yang digunakan yaitu 117 perusahaan non keuangan yang tercatat di *Amman Stock Echange* (ASE). Penelitian menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan untuk tahun buku 2010, 2011, dan 2012. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan, ukuran KAP, tipe

industri, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*.

Yousef Mohammad Hassan dan Kamal Naser (2013) melakukan penelitian dengan judul “*Determinants of Audit Fees: Evidence from an Emerging Economy*”. Sampel yang digunakan yaitu 30 perusahaan non keuangan yang tercatat di Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) pada tahun 2011. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, tipe industri, independensi komite audit dan *audit report lag* berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu, konflik agensi yang dapat berbeda-beda tingkatannya pada tiap perusahaan maka penelitian lebih lanjut dibutuhkan dengan kondisi yang disesuaikan di Indonesia. Obyek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 dan 2013.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan yaitu “Apakah ukuran KAP, tipe industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 dan 2013?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh ukuran KAP, tipe industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan *audit tenure* berpengaruh terhadap

audit fee pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 dan 2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak manajemen perusahaan, akuntan publik, dan akademisi.

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam melakukan negosiasi mengenai jumlah *audit fee*, dan mengendalikan aspek internal perusahaan yang menyebabkan tingginya jumlah *audit fee*.

2. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akuntan publik dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *audit fee* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akuntan publik untuk menetapkan jumlah imbalan yang sesuai untuk jasa auditnya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pembuatan kebijakan mengenai *audit fee*.

1.5. Sistematika Skripsi

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan. Sistematika penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian mengenai kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan terhadap jasa audit laporan keuangan untuk menjembatani adanya *agency conflicts* dalam perusahaan, dimana penugasan auditor menimbulkan biaya bagi perusahaan dan penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee*. Rumusan masalah yang diangkat menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi besarnya jumlah *audit fee*. Bab ini juga menjelaskan tujuan serta manfaat penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hasil studi pustaka berupa teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Landasan teori berisi tentang teori mengenai keagenan, *audit fee*, ukuran KAP, tipe industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan *audit tenure*. Selanjutnya disajikan mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah. Dalam bab ini juga ditentukan pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, identifikasi variabel yang terdiri dari variabel independen (ukuran KAP, tipe industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan *audit tenure*) dan variabel dependen (*audit fee*) dan definisi operasional variabel yang berisi penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang merupakan data

sekunder berasal dari Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012 dan 2013, prosedur pengumpulan data dijelaskan melalui langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data, populasi dan sampel yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI untuk periode 2012 dan 2013, dan teknik analisis data yang menggunakan analisis regresi data panel.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek dan subjek penelitian dengan sampel yang digunakan yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012 dan 2013, deskripsi hasil penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran sampel penelitian, analisis model yang menggunakan uji asumsi klasik sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda dan analisis hipotesis yang menggunakan model regresi linier berganda, pembahasan hasil penelitian masing-masing variabel yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan yang disusun berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan.